

**AKTIVITAS POLITIK KORPORASI DALAM TATA KELOLA TRANSISI ENERGI:
TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TENTANG PENGARUH KEBIJAKAN,
REGULATORY CAPTURE, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK**

S. Milton Pakpahan^{1*}

¹ Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

* milton@uta45jakarta.ac.id

Abstrak

Studi ini mengkaji *Corporate Political Activity* dalam tata kelola transisi energi dengan menitikberatkan pada pengaruh kebijakan, risiko regulatory capture, dan akuntabilitas publik. Transisi energi tidak hanya merupakan agenda teknologi dan investasi, tetapi juga arena politik kebijakan yang melibatkan korporasi, regulator, industri, masyarakat sipil, dan aktor global. Meskipun literatur tentang Corporate Political Activity, kebijakan energi, climate governance, dan regulatory capture terus berkembang, kajian yang mengintegrasikan seluruh bidang tersebut dalam satu kerangka tata kelola publik masih terbatas. Penelitian ini menggunakan desain Systematic Literature Review berbasis PRISMA 2020 terhadap artikel jurnal open access terindeks Scopus periode 2020–2026. Dari 373 dokumen awal, proses seleksi menghasilkan 30 artikel final yang dianalisis melalui thematic synthesis. Hasil review menunjukkan bahwa CPA dalam transisi energi muncul melalui corporate lobbying, climate lobbying, fossil fuel lobbying, industry influence, policy advocacy, disinformation, shareholder engagement, dan regulatory capture. CPA memiliki peran ganda: dapat mempercepat transisi melalui dukungan terhadap energi bersih dan dekarbonisasi, tetapi juga dapat menghambat transisi melalui pelemahan regulasi, narasi penundaan, dan dominasi industri. Kontribusi utama studi ini adalah pengembangan model *public governance* terintegrasi yang menghubungkan *Corporate Political Activity*, *policy influence mechanisms*, *energy transition governance outcomes*, *regulatory capture*, dan *public accountability*. Studi ini menegaskan pentingnya transparansi lobbying, partisipasi publik, independensi regulator, dan akuntabilitas demokratis dalam menjaga integritas tata kelola transisi energi.

Kata kunci: *Corporate Political Activity*; tata kelola transisi energi; *corporate lobbying*; *regulatory capture*; akuntabilitas publik; *climate policy*; *PRISMA*

Abstrack

This study examines Corporate Political Activity in energy transition governance, with a focus on policy influence, the risk of regulatory capture, and public accountability. The energy transition is not merely an agenda of technology and investment, but also a policy political arena involving corporations, regulators, industry, civil society, and global actors. Although the literature on Corporate Political Activity, energy policy, climate governance, and regulatory capture continues to develop, studies that integrate all these fields within a single public governance framework remain limited. This study employs a Systematic Literature Review design based on PRISMA 2020, focusing on open-access journal articles indexed in Scopus from 2020–2026. Of the 373 initial documents, the selection process resulted in 30 final articles, which were analyzed using thematic synthesis. The review findings indicate that CPA in the energy transition takes the form of corporate lobbying, climate lobbying, fossil fuel lobbying, industry influence, policy advocacy, disinformation, shareholder engagement, and regulatory capture. CPA has a dual role: it can accelerate the transition by supporting clean energy and decarbonization, but it can also hinder the transition through regulatory weakening, delay narratives, and industry dominance. The main contribution of this study is the development of an integrated public governance model that connects Corporate Political Activity, policy influence mechanisms, energy transition governance outcomes, regulatory capture, and public accountability. The study emphasizes

the importance of lobbying transparency, public participation, regulatory independence, and democratic accountability in safeguarding the integrity of energy transition governance.

Keywords: *Corporate Political Activity; energy transition governance; corporate lobbying; regulatory capture; public accountability; climate policy; PRISMA*

A. Pendahuluan

Tata kelola transisi energi berada pada ruang yang kompleks antara komitmen iklim global, regulasi publik, kepentingan korporasi, dan akuntabilitas demokratis. Paris Agreement menegaskan perlunya pembatasan kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C dan upaya untuk menahannya pada 1,5°C di atas tingkat pra industri (UNFCCC, 2015). Komitmen tersebut menuntut transformasi mendasar dalam produksi, distribusi, konsumsi, dan regulasi energi. Sektor energi menjadi pusat agenda ini karena menyumbang lebih dari tiga perempat emisi gas rumah kaca global (IEA, 2025). Selain itu, COP28 melalui UAE Consensus semakin memperkuat arah kebijakan global untuk melakukan transisi menjauh dari bahan bakar fosil secara adil, teratur, dan berkeadilan (UNFCCC, 2023). Perkembangan ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan hanya agenda teknologi dan investasi, tetapi juga persoalan tata kelola publik, kontestasi politik, kapasitas kelembagaan, dan pertarungan kepentingan.

Isu kedua berkaitan dengan peran korporasi dan industri dalam membentuk kebijakan transisi energi. Kebijakan energi sangat bergantung pada keputusan negara mengenai subsidi, pasar listrik, penghentian bertahap bahan bakar fosil, insentif energi terbarukan, standar emisi, harga karbon, izin pertambangan, regulasi minyak dan gas, serta arah kebijakan net zero. Keputusan-keputusan tersebut dapat membuka peluang bagi perusahaan energi bersih, tetapi sekaligus mengancam perusahaan energi fosil dan industri padat karbon. Karena itu, korporasi tidak hanya merespons regulasi secara pasif, tetapi juga berupaya memengaruhi desain kebijakan, prioritas regulasi, dan narasi publik. Dalam konteks inilah Corporate Political Activity atau CPA menjadi konsep penting untuk memahami bagaimana korporasi memengaruhi tata kelola transisi energi (Hillman et al., 2004; Pakpahan & Hutahayan, 2026).

Corporate Political Activity merujuk pada upaya korporasi untuk memengaruhi kebijakan publik dan proses politik melalui lobbying, advokasi kebijakan, koneksi politik, asosiasi industri, partisipasi dalam konsultasi regulasi, dukungan politik, komunikasi publik, dan strategi non-pasar lainnya (Hillman et al., 2004; Lawton et al., 2013). Literatur terdahulu umumnya memosisikan CPA sebagai non-market strategy yang digunakan perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian regulasi, memperoleh keuntungan kebijakan, mengakses sumber daya pemerintah, dan memperkuat legitimasi (Baron, 1995; Mellahi et al., 2016). Dalam perspektif Resource-Based View, CPA dapat dipahami sebagai sumber daya strategis yang mendukung daya saing perusahaan dalam lingkungan regulatif yang tidak pasti (Barney, 1991). Dalam perspektif Institutional Theory, CPA dapat dipahami sebagai mekanisme perusahaan untuk merespons tekanan kelembagaan, memperoleh legitimasi, dan memengaruhi ekspektasi regulatif (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2014). Namun, CPA juga dapat menimbulkan risiko tata kelola, seperti rent-seeking, bribery, konflik kepentingan, regulatory capture, policy

capture, dan lemahnya akuntabilitas publik (Stigler, 1971; Dal Bó, 2006; Pakpahan & Hutahayan, 2026).

Permasalahan menjadi semakin penting ketika pengaruh korporasi memengaruhi arah dan integritas tata kelola transisi energi. Dalam kondisi tertentu, CPA dapat mempercepat transisi energi apabila digunakan untuk mendukung insentif energi terbarukan, kepastian investasi rendah karbon, dekarbonisasi industri, dan penguatan regulasi iklim. Namun, CPA juga dapat menghambat transisi energi apabila digunakan untuk mempertahankan kepentingan bahan bakar fosil, menunda kebijakan iklim, melemahkan standar emisi, membentuk narasi penundaan, atau memengaruhi regulator agar kebijakan lebih berpihak pada industri. Studi tentang incumbent lobbying menunjukkan bahwa aktor industri lama dapat menghambat regulasi energi yang lebih forward-looking (Lockwood et al., 2020). Kajian lain menunjukkan bahwa lobbying, corporate climate lobbying, policy framing, dan strategi politik korporasi dapat memengaruhi regulasi emisi, kebijakan energi, serta arah transisi industri (Sick, 2023; Errichiello et al., 2026; Reuter & Überbacher, 2025).

Selain melalui lobbying formal, pengaruh korporasi dalam transisi energi juga dapat berlangsung melalui wacana publik, komunikasi digital, disinformasi, dan pembentukan legitimasi sosial. Holder et al. (2023) menunjukkan bahwa organisasi penghambat iklim menggunakan iklan Facebook untuk menyebarkan discourse of delay. Marsili (2025) menempatkan disinformasi dan kontrol informasi sebagai bagian dari corporate influence dalam transisi energi Eropa. Miller et al. (2025) menunjukkan bagaimana road lobby membentuk wacana kebijakan transportasi yang berkaitan dengan energi, kesehatan publik, dan keberlanjutan. Studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa transisi energi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, pembiayaan, atau desain kebijakan, tetapi juga oleh strategi politik, framing, dan perebutan legitimasi dalam ruang publik.

Isu tersebut berkaitan erat dengan regulatory capture dan akuntabilitas publik. Regulatory capture terjadi ketika regulator atau pembuat kebijakan lebih responsif terhadap kepentingan industri yang diatur daripada kepentingan publik (Stigler, 1971; Carpenter & Moss, 2014). Dalam sektor energi, risiko capture semakin tinggi karena industri memiliki sumber daya ekonomi, akses politik, informasi teknis, serta kapasitas komunikasi yang lebih besar dibandingkan banyak kelompok masyarakat. Woods et al. (2026) menunjukkan bahwa regulatory capture dapat dipahami melalui organisasi industri dan struktur pengaruhnya terhadap regulasi. Jang dan Kagan (2025) memperlihatkan bagaimana tekanan politik dalam konteks minyak dan gas dapat memengaruhi ruang partisipasi publik. Xie et al. (2025) juga menegaskan pentingnya inklusivitas dan dinamika kelompok kepentingan dalam tata kelola iklim global. Dengan demikian, CPA perlu dilihat bukan hanya sebagai strategi bisnis, tetapi juga sebagai isu administrasi publik dan tata kelola demokratis.

State of the art menunjukkan bahwa literatur yang ada masih terfragmentasi. Literatur manajemen strategis cenderung membahas CPA dalam kaitannya dengan firm-level outcomes, seperti kinerja, daya saing, inovasi, investasi, akses pemerintah, dan legitimasi perusahaan (Hillman et al., 2004; Mellahi et al., 2016; Pakpahan & Hutahayan, 2026). Literatur kebijakan

energi lebih banyak membahas instrumen kebijakan, pengembangan energi terbarukan, regulasi karbon, jalur dekarbonisasi, dan transformasi teknologi (Hafner et al., 2022; Bare et al., 2026). Sementara itu, literatur administrasi publik dan governance membahas akuntabilitas, partisipasi, kualitas regulasi, dan legitimasi kelembagaan, tetapi belum selalu menghubungkannya secara eksplisit dengan strategi politik korporasi. Literatur politik iklim memang mulai menyoroti lobbying, industry influence, obstruction, dan disinformation, tetapi berbagai kajian tersebut belum banyak disintesis dalam satu kerangka yang menjelaskan bagaimana CPA membentuk tata kelola transisi energi (Holder et al., 2023; Marsili, 2025; Miller et al., 2025; Woods et al., 2026).

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini melakukan Systematic Literature Review terhadap artikel jurnal open access terindeks Scopus yang terbit pada periode 2020–2026. Kajian ini berfokus pada literatur yang membahas Corporate Political Activity, corporate lobbying, climate lobbying, fossil fuel lobbying, industry influence, policy advocacy, political strategy, regulatory capture, dan public accountability dalam kaitannya dengan energy transition, energy policy, climate policy, renewable energy, fossil fuel governance, power sector regulation, net zero, dan decarbonisation. Artikel ini diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan penelitian: bagaimana CPA dikonseptualisasikan dalam literatur tata kelola transisi energi; bentuk pengaruh politik korporasi dan industri apa yang digunakan untuk membentuk kebijakan dan regulasi transisi energi; bagaimana CPA berkontribusi terhadap percepatan atau hambatan tata kelola transisi energi; serta risiko akuntabilitas publik dan regulasi apa yang muncul dari CPA dalam sektor energi.

Artikel ini menawarkan empat kontribusi utama. Pertama, artikel ini memetakan konseptualisasi CPA dalam literatur tata kelola transisi energi. Kedua, artikel ini mengklasifikasikan bentuk dan mekanisme pengaruh politik korporasi serta industri dalam kebijakan energi dan iklim. Ketiga, artikel ini menjelaskan bagaimana CPA dapat mempercepat atau menghambat tata kelola transisi energi. Keempat, artikel ini mengidentifikasi risiko akuntabilitas publik dan regulasi yang muncul dari CPA, khususnya regulatory capture, policy capture, konflik kepentingan, disinformasi, dan lemahnya transparansi. Kontribusi utama artikel ini adalah pengembangan kerangka public governance terintegrasi yang menggeser CPA dari sekadar strategi non-pasar perusahaan menjadi mekanisme tata kelola yang memengaruhi kualitas kebijakan, independensi regulasi, akuntabilitas demokratis, dan arah transisi energi.

B. Literature Review

1. Corporate Political Activity sebagai Non-Market Strategy

Corporate Political Activity (CPA) merujuk pada aktivitas korporasi yang diarahkan untuk memengaruhi kebijakan publik, keputusan regulasi, dan proses politik. CPA dapat dilakukan melalui lobbying, advokasi kebijakan, koneksi politik, partisipasi dalam konsultasi regulasi, penggunaan asosiasi industri, dukungan terhadap aktor politik, komunikasi publik, dan strategi non-pasar lainnya (Hillman et al., 2004; Lawton et al., 2013). Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya bersaing melalui mekanisme pasar, seperti harga, inovasi, kualitas

produk, dan efisiensi operasional, tetapi juga melalui kemampuan membentuk lingkungan politik dan regulatif yang memengaruhi keberlangsungan bisnisnya.

Dalam perspektif non-market strategy, strategi perusahaan tidak hanya mencakup relasi dengan konsumen, pesaing, dan pemasok, tetapi juga dengan aktor politik dan kelembagaan yang dapat menentukan aturan main pasar. Baron (1995) menjelaskan bahwa strategi perusahaan perlu dipahami melalui integrasi antara market strategy dan non-market strategy. Market strategy diarahkan pada persaingan ekonomi, sedangkan non-market strategy diarahkan pada lingkungan sosial, politik, hukum, dan kelembagaan. Karena itu, CPA menjadi sangat penting dalam sektor yang sangat dipengaruhi oleh keputusan negara dan regulasi publik, termasuk sektor energi (Mellahi et al., 2016; Pakpahan & Hutahayan, 2026).

Secara teoretis, CPA dapat dijelaskan melalui Resource-Based View dan Institutional Theory. Resource-Based View memandang sumber daya dan kapabilitas perusahaan sebagai dasar keunggulan kompetitif ketika sumber daya tersebut bernilai, langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan (Barney, 1991). Dalam kerangka ini, CPA dapat dipahami sebagai kapabilitas strategis yang membantu perusahaan memperoleh akses terhadap informasi kebijakan, mengurangi ketidakpastian regulasi, dan membangun posisi yang lebih menguntungkan dalam lingkungan kebijakan. Sementara itu, Institutional Theory memandang organisasi sebagai aktor yang beroperasi dalam tekanan institusional, baik regulatif, normatif, maupun kognitif (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2014). Dari perspektif ini, CPA dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh legitimasi, menyesuaikan diri dengan tekanan kelembagaan, atau memengaruhi ekspektasi regulatif yang berlaku.

Namun, CPA juga memiliki sisi problematik. Aktivitas politik korporasi dapat menimbulkan risiko apabila dilakukan secara tidak transparan, tidak akuntabel, atau diarahkan untuk mempertahankan kepentingan sempit perusahaan dengan mengorbankan kepentingan publik. Studi tentang CPA menunjukkan bahwa aktivitas politik korporasi dapat menghasilkan manfaat strategis, tetapi juga dapat menimbulkan agency problems, reputational risks, bribery, dan penyimpangan tata kelola dalam konteks kelembagaan yang lemah (Mellahi et al., 2016; Pakpahan & Hutahayan, 2026). Dalam konteks regulasi, risiko tersebut dapat berkembang menjadi rent-seeking, policy capture, atau regulatory capture ketika pengaruh korporasi membuat kebijakan publik lebih berpihak pada kepentingan industri daripada kepentingan masyarakat luas (Stigler, 1971; Dal Bó, 2006).

2. Analytical Framework

Berdasarkan kajian konseptual di atas, artikel ini memosisikan CPA sebagai mekanisme pengaruh politik korporasi dalam tata kelola transisi energi. CPA dipahami sebagai input strategis yang dilakukan oleh perusahaan, asosiasi industri, atau aktor bisnis terkait energi. Input tersebut bekerja melalui policy influence mechanisms, seperti lobbying, policy advocacy, political connections, industry association, public consultation, framing, digital communication, disinformation, shareholder engagement, dan strategi legitimasi berbasis CSR atau ESG (Hillman et al., 2004; Lawton et al., 2013; Reuter & Überbacher, 2025; Holder et al., 2023).

Kerangka analitis artikel ini menghubungkan CPA dengan dua kemungkinan outcome dalam energy transition governance. Outcome pertama adalah acceleration, yaitu ketika CPA

membantu mempercepat transisi energi melalui dukungan terhadap energi terbarukan, dekarbonisasi industri, regulasi emisi yang kuat, investasi rendah karbon, dan inovasi energi bersih. Outcome kedua adalah obstruction, yaitu ketika CPA menghambat transisi energi melalui pelemahan regulasi, penundaan kebijakan iklim, perlindungan subsidi energi fosil, disinformasi, policy capture, atau regulatory capture (Lockwood et al., 2020; Holder et al., 2023; Marsili, 2025; Woods et al., 2026).

Kerangka ini juga menempatkan public accountability sebagai kondisi penting yang memengaruhi arah dampak CPA. Ketika akuntabilitas publik kuat, CPA lebih mudah dikendalikan melalui transparansi, partisipasi, pengawasan, dan pembatasan konflik kepentingan. Sebaliknya, ketika akuntabilitas publik lemah, CPA lebih berisiko menciptakan dominasi industri, regulatory capture, policy capture, dan penurunan legitimasi kebijakan (Carpenter & Moss, 2014; Xie et al., 2025; Jang & Kagan, 2025). Dengan demikian, hubungan antara CPA dan transisi energi tidak dapat dilepaskan dari kualitas kelembagaan, independensi regulator, transparansi kebijakan, partisipasi publik, dan mekanisme pengawasan.

Secara konseptual, hubungan utama dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Corporate Political Activity memengaruhi energy transition governance melalui policy influence mechanisms. Pengaruh tersebut dapat menghasilkan dua arah, yaitu mempercepat atau menghambat transisi energi. Arah pengaruh tersebut dipengaruhi oleh kualitas institusi, independensi regulator, transparansi kebijakan, partisipasi publik, dan akuntabilitas publik.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, menganalisis, dan menyintesis literatur mengenai Corporate Political Activity dalam tata kelola transisi energi. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan prosedur yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi dalam meninjau perkembangan pengetahuan pada suatu bidang kajian (Tranfield et al., 2003; Snyder, 2019). Dalam konteks penelitian ini, SLR digunakan karena literatur mengenai pengaruh politik korporasi dalam kebijakan energi tersebar dalam beberapa bidang, seperti non-market strategy, energy policy, climate governance, public administration, regulatory capture, dan public accountability. Dengan menggunakan SLR, penelitian ini dapat menyusun pemetaan literatur secara sistematis dan menjelaskan bagaimana aktivitas politik korporasi membentuk kebijakan energi, regulasi iklim, dan arah transisi menuju sistem energi rendah karbon.

Proses review dilakukan dengan mengacu pada prinsip PRISMA 2020 untuk memastikan proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan pemilihan artikel dilakukan secara transparan dan dapat dilacak (Page et al., 2021). Selain itu, strategi pencarian juga disusun dengan memperhatikan prinsip PRISMA-S, terutama dalam pelaporan database, kata kunci, batasan pencarian, dan logika seleksi artikel (Rethlefsen et al., 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan thematic synthesis karena artikel yang dianalisis tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencakup kajian kebijakan, tata kelola, politik iklim, studi kasus, analisis wacana, dan studi konseptual. Thematic synthesis digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dalam literatur secara sistematis (Thomas & Harden, 2008). Dengan demikian, sintesis dalam penelitian ini bersifat concept-centric, yaitu berfokus pada konsep, mekanisme, dan pola tematik yang muncul dalam

artikel final, bukan semata-mata pada ringkasan setiap artikel secara terpisah (Webster & Watson, 2002).

a. Identification

Pada tahap identification, artikel diidentifikasi melalui database Scopus. Scopus dipilih karena memiliki cakupan luas terhadap jurnal internasional bereputasi dalam bidang energi, kebijakan publik, tata kelola, perubahan iklim, manajemen strategis, administrasi publik, dan studi keberlanjutan. Penggunaan satu database utama juga membantu menjaga konsistensi proses pencarian, penyaringan, dan pelaporan metadata artikel. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang merepresentasikan tiga dimensi utama penelitian, yaitu Corporate Political Activity, transisi energi, dan tata kelola publik.

String pencarian yang digunakan adalah sebagai berikut:

TITLE-ABS-KEY (("corporate political activity" OR "corporate lobbying" OR "climate lobbying" OR "fossil fuel lobbying" OR "industry lobbying" OR ((corporat* OR firm* OR industr* OR business*) W/3 (lobby* OR influenc* OR advocacy OR "political activ*" OR "political strateg*" OR "political connection*"))) AND ("energy transition" OR "energy policy" OR "climate policy" OR "renewable energy" OR "fossil fuel*" OR "oil and gas" OR coal OR electricity OR "power sector" OR "net zero" OR decarboni?ation) AND (governance OR regulation OR "public policy" OR accountability OR "regulatory capture" OR "policy capture"))

String tersebut dirancang untuk menangkap variasi istilah yang digunakan dalam literatur. Dalam kajian energi dan iklim, istilah Corporate Political Activity tidak selalu muncul secara eksplisit. Substansi CPA sering muncul melalui istilah corporate lobbying, climate lobbying, fossil fuel lobbying, industry influence, policy advocacy, political strategy, political connection, corporate influence, atau regulatory capture. Oleh karena itu, string pencarian diperluas agar mampu menjangkau artikel yang secara substantif membahas pengaruh politik korporasi dan industri dalam kebijakan energi, kebijakan iklim, serta tata kelola transisi energi. Pencarian awal melalui Scopus menghasilkan 373 dokumen.

b. Screening

Pada tahap screening, hasil awal pencarian disaring menggunakan batasan publikasi yang telah ditentukan. Batasan tersebut meliputi artikel jurnal open access, berbahasa Inggris, berada pada periode publikasi 2020–2026, dan termasuk dalam sumber jurnal. Kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis berasal dari publikasi ilmiah yang dapat diakses secara penuh, relevan secara temporal, dan sesuai dengan fokus kajian terbaru. Setelah batasan tersebut diterapkan, jumlah artikel yang tersisa adalah 107 artikel.

Selanjutnya, 107 artikel tersebut ditelaah berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci. Tahap ini merupakan bagian penting dalam SLR karena berfungsi memastikan kesesuaian awal antara artikel dan fokus penelitian sebelum dilakukan telaah teks penuh (Page et al., 2021; Snyder, 2019). Artikel dinilai relevan apabila memuat keterkaitan dengan Corporate Political Activity, corporate lobbying, climate lobbying, fossil fuel lobbying, industry influence, policy advocacy, political strategy, energy transition governance, climate policy, regulatory capture, atau public accountability. Artikel yang tidak memiliki kesesuaian dengan fokus penelitian

tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah proses screening, sebanyak 45 artikel dinyatakan layak untuk ditelaah melalui full-text assessment.

c. Eligibility

Pada tahap eligibility, 45 artikel hasil screening ditelaah berdasarkan teks penuh. Penilaian teks penuh dilakukan untuk memastikan bahwa artikel tidak hanya memuat kata kunci yang relevan, tetapi juga memiliki substansi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap ini penting karena SLR tidak hanya bergantung pada kecocokan kata kunci, tetapi juga pada relevansi konseptual dan kontribusi analitis artikel terhadap tujuan review (Tranfield et al., 2003; Page et al., 2021).

Artikel dinilai layak apabila membahas pengaruh politik korporasi, industri, atau asosiasi bisnis terhadap kebijakan energi, kebijakan iklim, regulasi, tata kelola transisi energi, regulatory capture, atau akuntabilitas publik. Artikel yang tidak secara memadai membahas Corporate Political Activity atau tidak memberikan kontribusi langsung terhadap fokus penelitian tidak dimasukkan dalam korpus final. Setelah proses eligibility, 30 artikel ditetapkan sebagai artikel final untuk dianalisis. Dengan demikian, sintesis dalam penelitian ini didasarkan pada 30 artikel open access terindeks Scopus periode 2020–2026 yang relevan dengan Corporate Political Activity dalam tata kelola transisi energi.

d. Included

Sebanyak 30 artikel final dimasukkan dalam analisis. Artikel-artikel tersebut dipilih karena memiliki relevansi substantif dengan empat pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama berkaitan dengan bagaimana Corporate Political Activity dikonseptualisasikan dalam literatur tata kelola transisi energi. Pertanyaan kedua berkaitan dengan bentuk pengaruh politik korporasi dan industri yang digunakan untuk membentuk kebijakan serta regulasi transisi energi. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan bagaimana CPA mempercepat atau menghambat tata kelola transisi energi. Pertanyaan keempat berkaitan dengan risiko akuntabilitas publik dan regulasi yang muncul dari CPA dalam sektor energi.

Artikel final tidak diperlakukan sebagai kelompok yang sepenuhnya terpisah berdasarkan masing-masing research question. Satu artikel dapat memberikan kontribusi terhadap lebih dari satu pertanyaan penelitian, misalnya artikel yang membahas corporate lobbying dapat sekaligus menjawab konseptualisasi CPA, bentuk pengaruh politik korporasi, dan dampaknya terhadap regulasi energi. Oleh karena itu, sintesis dilakukan berdasarkan relevansi tematik terhadap setiap research question, bukan berdasarkan pembagian artikel yang saling eksklusif. Pendekatan ini sejalan dengan sintesis konseptual yang menekankan pengelompokan literatur berdasarkan tema dan kontribusi konsep, bukan hanya berdasarkan unit bibliografis yang terpisah (Webster & Watson, 2002; Thomas & Harden, 2008).

e. Data Extraction

Data dari 30 artikel final diekstraksi menggunakan matriks yang memuat informasi bibliografis, metodologis, teoretis, dan tematik. Informasi yang diekstraksi meliputi nama penulis, tahun publikasi, judul artikel, nama jurnal, negara atau wilayah kajian, sektor energi atau sektor terkait karbon, metode penelitian, teori atau konsep utama, bentuk Corporate Political Activity, domain kebijakan yang dipengaruhi, temuan utama, serta relevansi artikel

terhadap masing-masing research question. Penggunaan matriks ekstraksi bertujuan menjaga konsistensi pencatatan data dan memudahkan proses perbandingan lintas-artikel.

Proses ekstraksi diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana setiap artikel memosisikan korporasi, industri, atau asosiasi bisnis dalam proses tata kelola transisi energi. Artikel diklasifikasikan berdasarkan bentuk pengaruh politik yang muncul, seperti lobbying, climate lobbying, fossil fuel lobbying, industry lobbying, policy advocacy, political strategy, political connection, industry association, policy framing, public communication, digital influence, disinformation, shareholder engagement, corporate response to climate policy, dan regulatory capture. Klasifikasi ini dilakukan agar sintesis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi mampu menunjukkan pola konseptual dan mekanisme pengaruh politik korporasi dalam literatur.

Matriks ekstraksi digunakan untuk memastikan bahwa sintesis dapat menunjukkan kontribusi masing-masing artikel terhadap pengembangan tema utama penelitian. Data yang diekstraksi kemudian diorganisasikan ke dalam empat kelompok analitis sesuai dengan research questions, yaitu konseptualisasi CPA, bentuk pengaruh politik korporasi, dampak CPA terhadap transisi energi, serta risiko regulatory capture dan public accountability. Dengan cara ini, hasil review dapat disusun secara sistematis dan langsung terhubung dengan pertanyaan penelitian.

f. Synthesis

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan thematic synthesis. Pendekatan ini digunakan karena 30 artikel final memiliki karakter metodologis yang beragam, mencakup studi kebijakan, analisis regulasi, studi kasus, analisis wacana, analisis jaringan, kajian konseptual, dan penelitian empiris. Karena itu, sintesis tidak diarahkan untuk menghitung efek statistik, tetapi untuk mengidentifikasi pola konseptual, bentuk pengaruh, mekanisme kebijakan, dan risiko tata kelola yang muncul dalam literatur. Thematic synthesis memungkinkan peneliti mengembangkan tema analitis dari berbagai studi yang berbeda secara metodologis, tetapi memiliki keterkaitan konseptual dengan fokus penelitian (Thomas & Harden, 2008).

Sintesis dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi bagaimana CPA dikonseptualisasikan dalam literatur tata kelola transisi energi. Pada tahap ini, berbagai istilah seperti corporate political activity, corporate lobbying, climate lobbying, fossil fuel lobbying, industry influence, policy advocacy, political strategy, dan regulatory capture dipetakan sebagai variasi konseptual dari pengaruh politik korporasi. Tahap kedua adalah mengklasifikasikan bentuk dan mekanisme CPA, seperti lobbying formal, asosiasi industri, framing kebijakan, advokasi publik, disinformasi, digital communication, dan partisipasi dalam proses regulasi.

Tahap ketiga adalah menganalisis dampak CPA terhadap tata kelola transisi energi. Pada tahap ini, artikel dianalisis untuk melihat apakah CPA berperan sebagai acceleration mechanism atau obstruction mechanism. CPA dipahami sebagai acceleration mechanism apabila mendukung kebijakan energi bersih, investasi rendah karbon, dekarbonisasi industri, pengembangan energi terbarukan, atau penguatan regulasi iklim. Sebaliknya, CPA dipahami sebagai obstruction mechanism apabila digunakan untuk melemahkan regulasi emisi, menunda

kebijakan iklim, mempertahankan subsidi fosil, memperpanjang ketergantungan terhadap energi karbon, menyebarkan disinformasi, atau memperkuat regulatory capture.

Tahap keempat adalah mengidentifikasi risiko tata kelola publik yang muncul dari CPA. Risiko tersebut mencakup regulatory capture, policy capture, konflik kepentingan, ketidakseimbangan akses terhadap pembuat kebijakan, lemahnya transparansi, disinformasi, dominasi industri dalam proses regulasi, dan penurunan legitimasi kebijakan. Hasil sintesis kemudian digunakan untuk membangun model konseptual integratif yang menghubungkan Corporate Political Activity, policy influence mechanisms, energy transition governance, regulatory capture, dan public accountability.

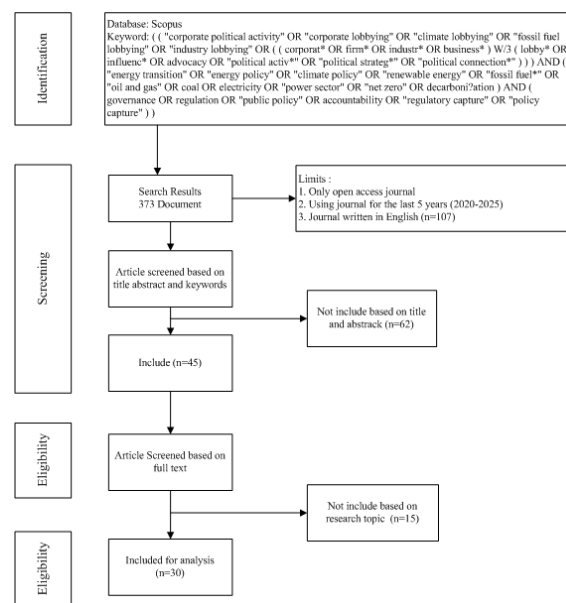


Figure 1. PRISMA-Based Article Selection Process

Gambar 1 mengilustrasikan proses seleksi berbasis PRISMA yang digunakan dalam tinjauan ini. Pencarian awal di Scopus menghasilkan 373 dokumen. Setelah menerapkan batasan artikel jurnal akses terbuka, bahasa Inggris, jenis sumber jurnal, dan tahun publikasi 2020–2026, tersisa 107 artikel. Penyaringan judul, abstrak, dan kata kunci menghasilkan 45 artikel untuk penilaian teks lengkap. Setelah penilaian kelayakan teks lengkap, 30 artikel dimasukkan dalam sintesis akhir.

D. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil

1. Matriks Ekstraksi Data Artikel Terpilih

Pada tahap ini, seluruh artikel yang memenuhi kriteria inklusi diekstraksi untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai karakteristik dan kontribusi masing-masing studi terhadap tujuan penelitian. Proses ekstraksi mencakup informasi mengenai penulis dan tahun publikasi, judul artikel, sumber jurnal, konteks negara atau wilayah kajian, sektor energi atau sektor padat karbon yang dibahas, pendekatan metodologis, bentuk Corporate Political Activity, domain kebijakan yang dipengaruhi, serta kontribusi artikel terhadap masing-masing research question. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip systematic literature review yang

menekankan pentingnya pencatatan data secara transparan, terstruktur, dan dapat ditelusuri (Tranfield et al., 2003; Snyder, 2019; Page et al., 2021). Karena matriks ekstraksi memuat informasi yang cukup rinci, bagian utama artikel ini menyajikan ringkasan tematik berdasarkan research question, sedangkan matriks lengkap dapat ditempatkan pada Appendix 1.

Secara umum, 30 artikel final menunjukkan bahwa Corporate Political Activity dalam tata kelola transisi energi tidak selalu muncul dengan istilah Corporate Political Activity secara eksplisit. Sebagian besar artikel menggunakan istilah yang lebih spesifik, seperti corporate lobbying, climate lobbying, fossil fuel lobbying, industry lobbying, industry influence, policy advocacy, political strategy, policy entrepreneurship, disinformation, dan regulatory capture (Lockwood et al., 2020; Sick, 2023; Holder et al., 2023; Errichiello et al., 2026; Woods et al., 2026). Keragaman istilah tersebut menunjukkan bahwa CPA dalam konteks energi dan iklim merupakan konsep lintas-disiplin yang tersebar dalam literatur kebijakan energi, politik iklim, governance, sustainability, business strategy, dan public administration.

Artikel final juga menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya melibatkan perusahaan energi dalam arti sempit, tetapi juga sektor yang lebih luas, seperti listrik, minyak dan gas, batubara, pertambangan mineral kritis, otomotif, transportasi maritim, transportasi jalan, industri kimia, industri pertanian, investor, serta organisasi yang terlibat dalam carbon dioxide removal (Battersby et al., 2022; Hafner et al., 2022; Bare et al., 2026; Lamb et al., 2025; von Malmborg, 2025; Auvet & Arnould de Sartre, 2026). Oleh karena itu, artikel ini menggunakan istilah energy-related and carbon-intensive actors untuk menangkap aktor-aktor korporasi dan industri yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan transisi energi.

2. Konseptualisasi Corporate Political Activity dalam Tata Kelola Transisi Energi (RQ1)

Untuk menjawab RQ1, artikel ini menyintesis studi yang menjelaskan bagaimana CPA dikonseptualisasikan dalam literatur tata kelola transisi energi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa CPA dipahami sebagai mekanisme pengaruh politik korporasi terhadap kebijakan publik, regulasi, dan proses transisi energi. Namun, istilah yang digunakan dalam literatur sangat beragam. Beberapa studi menggunakan istilah corporate lobbying, climate lobbying, fossil fuel lobbying, industry influence, policy advocacy, political strategy, dan regulatory capture sebagai bentuk konseptual dari CPA (Lockwood et al., 2020; Sick, 2023; Errichiello et al., 2026; Reuter & Überbacher, 2025; Woods et al., 2026).

Tabel 1. Ringkasan Temuan untuk RQ1

No.	Penulis	Temuan Utama untuk RQ1
1	Battersby et al. (2022)	Korporasi diposisikan sebagai aktor tata kelola dalam carbon dioxide removal, sehingga peran perusahaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dalam membentuk arah kebijakan iklim.
2	Lockwood et al. (2020)	Incumbent lobbying dikonseptualisasikan sebagai pengaruh politik aktor lama yang dapat menghambat regulasi energi yang lebih progresif.
3	Sick (2023)	Lobbying dipahami sebagai mekanisme pengaruh terhadap proses regulasi emisi CO ₂ kendaraan di Uni Eropa.

4	Errichiello et al. (2026)	Corporate climate lobbying dipahami sebagai bentuk keterlibatan korporasi dalam memengaruhi kebijakan iklim melalui preferensi, posisi, dan kepentingan perusahaan.
5	Reuter dan Überbacher (2025)	Political strategy dan procedural framing dikonseptualisasikan sebagai strategi perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian kebijakan energi berbasis misi.
6	Marsili (2025)	Corporate influence dikaitkan dengan kontrol informasi, disinformasi, dan pembentukan narasi dalam transisi energi.
7	Woods et al. (2026)	Regulatory capture dipahami sebagai bentuk pengaruh industri yang menggeser orientasi regulator dari kepentingan publik ke kepentingan sektor yang diatur.
8	Miller et al. (2025)	Road lobby dikonseptualisasikan sebagai pengaruh kelompok industri terhadap wacana kebijakan transportasi dan iklim.

Berdasarkan Tabel 1, CPA dalam literatur tata kelola transisi energi dapat dipahami melalui empat dimensi utama. Pertama, CPA sebagai lobbying formal yang diarahkan untuk memengaruhi kebijakan dan regulasi, sebagaimana terlihat dalam kajian mengenai incumbent lobbying dan regulasi emisi kendaraan (Lockwood et al., 2020; Sick, 2023). Kedua, CPA sebagai strategi politik perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian regulasi dan mengarahkan desain kebijakan (Reuter & Überbacher, 2025). Ketiga, CPA sebagai pengaruh industri kolektif melalui asosiasi, koalisi bisnis, atau kelompok kepentingan sektoral (Errichiello et al., 2026; Woods et al., 2026). Keempat, CPA sebagai pengaruh diskursif melalui framing, disinformasi, komunikasi publik, dan narasi penundaan kebijakan iklim (Holder et al., 2023; Marsili, 2025; Miller et al., 2025).

Sintesis RQ1 menunjukkan bahwa CPA dalam konteks transisi energi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan CPA dalam literatur manajemen strategis umum. Dalam literatur manajemen, CPA sering dipahami sebagai strategi non-pasar untuk memperoleh keuntungan perusahaan (Hillman et al., 2004; Lawton et al., 2013; Mellahi et al., 2016). Dalam literatur energy transition governance, CPA juga berfungsi sebagai mekanisme yang memengaruhi kualitas kebijakan publik, independensi regulasi, legitimasi transisi energi, dan akuntabilitas demokratis (Woods et al., 2026; Xie et al., 2025; Jang & Kagan, 2025). Dengan demikian, CPA dalam artikel ini dikonseptualisasikan sebagai strategi korporasi sekaligus fenomena tata kelola publik.

3. Bentuk Pengaruh Politik Korporasi dan Industri dalam Kebijakan Transisi Energi (RQ2)

Untuk menjawab RQ2, artikel ini menyintesis bentuk-bentuk pengaruh politik korporasi dan industri yang digunakan untuk membentuk kebijakan serta regulasi transisi energi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa CPA muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari lobbying formal, industry association, policy advocacy, political strategy, framing, digital communication, shareholder engagement, hingga disinformation (Benz et al., 2021; Holder et al., 2023; Sick, 2023; Reuter & Überbacher, 2025; Errichiello et al., 2026). Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa pengaruh politik korporasi tidak hanya berlangsung dalam ruang regulasi formal, tetapi juga dalam ruang publik, jaringan kebijakan, media digital, dan mekanisme pasar keuangan.

Tabel 2. Ringkasan Temuan untuk RQ2

No.	Penulis	Temuan Utama untuk RQ2
1	Lockwood et al. (2020)	Incumbent firms menggunakan lobbying untuk memengaruhi desain regulasi pasar kapasitas listrik.
2	Sick (2023)	Pengaruh lobbying terhadap regulasi emisi kendaraan dapat ditelusuri melalui jaringan aktor dan relasi kebijakan.
3	Errichiello et al. (2026)	Corporate climate lobbying muncul melalui posisi perusahaan terhadap kebijakan iklim dan preferensi regulatif.
4	Jang dan Kagan (2025)	Tekanan politik dan policy entrepreneurship memengaruhi kebijakan pembatasan protes di lokasi minyak dan gas.
5	Reuter dan Überbacher (2025)	Perusahaan menggunakan procedural framing untuk membentuk posisi dalam kebijakan energi berbasis misi.
6	Miller et al. (2025)	Road lobby membentuk wacana kebijakan transportasi melalui framing yang mengarahkan persepsi publik.
7	Holder et al. (2023)	Organisasi penghambat iklim menggunakan iklan Facebook untuk menyebarkan discourse of delay.
8	Marsili (2025)	Disinformasi dan information control digunakan sebagai bentuk pengaruh korporasi dalam transisi energi Eropa.
9	Benz et al. (2021)	Investor dapat menggunakan shareholder engagement untuk memengaruhi respons perusahaan terhadap risiko karbon.
10	von Malmborg (2025)	Policy entrepreneurs berperan dalam proses kebijakan dekarbonisasi transportasi maritim Uni Eropa.

Berdasarkan Tabel 2, bentuk CPA dalam tata kelola transisi energi dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok. Kelompok pertama adalah direct lobbying, yaitu upaya langsung memengaruhi pemerintah, regulator, atau pembuat kebijakan (Lockwood et al., 2020; Sick, 2023). Kelompok kedua adalah collective industry influence, yaitu pengaruh melalui asosiasi industri, koalisi bisnis, dan organisasi sektoral (Errichiello et al., 2026; Woods et al., 2026). Kelompok ketiga adalah policy framing, yaitu pembentukan makna dan narasi kebijakan untuk mengarahkan persepsi pembuat kebijakan atau publik (Reuter & Überbacher, 2025; Miller et al., 2025). Kelompok keempat adalah digital and communicative influence, yaitu penggunaan media digital, iklan, disinformasi, dan komunikasi publik untuk membentuk opini (Holder et al., 2023; Marsili, 2025). Kelompok kelima adalah investor and stakeholder pressure, yaitu pengaruh melalui pemegang saham, investor, atau aktor pasar keuangan (Benz et al., 2021).

Sintesis RQ2 menunjukkan bahwa pengaruh politik korporasi dalam transisi energi tidak hanya bekerja melalui akses formal terhadap pembuat kebijakan. CPA juga bekerja melalui produksi pengetahuan, pembentukan narasi, penggunaan data teknis, strategi komunikasi, akses terhadap forum konsultasi, dan tekanan dari aktor pasar (Reuter & Überbacher, 2025; Holder et al., 2023; Benz et al., 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa tata kelola transisi energi merupakan arena politik yang melibatkan berbagai saluran pengaruh, baik formal maupun informal.

4. CPA sebagai Mekanisme Percepatan atau Penghambat dalam Tata Kelola Transisi Energi (RQ3)

Untuk menjawab RQ3, artikel ini menyintesis bagaimana CPA berkontribusi terhadap percepatan atau hambatan tata kelola transisi energi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa CPA memiliki karakter ganda. Pada satu sisi, CPA dapat mendukung transisi energi apabila digunakan untuk mendorong kebijakan energi bersih, kepastian investasi rendah karbon, dekarbonisasi industri, dan penguatan regulasi iklim (Hafner et al., 2022; Bare et al., 2026; Heck et al., 2024). Pada sisi lain, CPA dapat menghambat transisi energi apabila digunakan untuk mempertahankan kepentingan energi fosil, melemahkan standar emisi, menunda reformasi kebijakan, atau menyebarkan narasi penundaan (Lockwood et al., 2020; Holder et al., 2023; Marsili, 2025)

Tabel 3. Ringkasan Temuan untuk RQ3

No.	Penulis	Temuan Utama untuk RQ3
1	Battersby et al. (2022)	Keterlibatan korporasi dalam carbon dioxide removal dapat mendukung inovasi kebijakan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola dan legitimasi.
2	Lockwood et al. (2020)	Incumbent lobbying dapat menghambat regulasi energi yang lebih forward-looking.
3	Sick (2023)	Lobbying dapat memengaruhi tingkat ambisi dan arah regulasi emisi kendaraan.
4	Bare et al. (2026)	Respons korporasi terhadap Paris Agreement menunjukkan variasi antara dukungan dekarbonisasi dan penyesuaian strategis terhadap tekanan iklim.
5	Hafner et al. (2022)	Perspektif perusahaan dalam dekarbonisasi industri menunjukkan pentingnya kebijakan yang mampu menyelaraskan kepentingan industri dan tujuan transisi.
6	Lamb et al. (2025)	Integrasi carbon dioxide removal oleh perusahaan minyak dan gas memperlihatkan keterlibatan aktor fosil dalam strategi iklim, tetapi juga menimbulkan risiko legitimasi.
7	Holder et al. (2023)	Climate obstruction organizations menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi penundaan transisi iklim.
8	Morris dan Jacquet (2024)	Industri animal agriculture dapat berperan dalam menghambat pemahaman dan kebijakan iklim melalui hubungan dengan institusi akademik.
9	Drahos (2025)	Fragmentasi bisnis terhadap reformasi kebijakan iklim menunjukkan bahwa kepentingan industri tidak selalu homogen.
10	Heck et al. (2024)	Perubahan orientasi keputusan industri menuju keberlanjutan menunjukkan potensi dukungan korporasi terhadap transisi, meskipun masih dipengaruhi kondisi kelembagaan.

Berdasarkan Tabel 3, CPA dapat dipahami sebagai acceleration mechanism ketika digunakan untuk memperkuat kebijakan energi bersih, mendorong inovasi rendah karbon, memperluas dukungan terhadap dekarbonisasi, dan membangun kepastian regulasi bagi investasi hijau (Hafner et al., 2022; Bare et al., 2026; Heck et al., 2024). Dalam konteks ini, CPA tidak selalu menjadi hambatan, tetapi dapat menjadi sarana untuk mempercepat reformasi kebijakan apabila kepentingan korporasi sejalan dengan tujuan transisi energi.

Namun, CPA juga dapat berfungsi sebagai obstruction mechanism ketika digunakan untuk mempertahankan model bisnis berbasis karbon. Obstruction dapat muncul dalam bentuk lobbying terhadap regulasi yang lebih lemah, penundaan kebijakan iklim, framing yang meragukan urgensi transisi, disinformasi, dan tekanan politik terhadap pembuat kebijakan (Lockwood et al., 2020; Holder et al., 2023; Marsili, 2025). Temuan tentang climate obstruction dan discourse of delay menunjukkan bahwa hambatan transisi energi tidak selalu terjadi melalui penolakan eksplisit, tetapi juga melalui strategi komunikasi yang menunda atau melemahkan urgensi kebijakan (Holder et al., 2023; Marsili, 2025).

Sintesis RQ3 menunjukkan bahwa pengaruh politik korporasi tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai baik atau buruk. CPA harus dinilai berdasarkan konsekuensinya terhadap arah transisi energi. Apabila CPA mendukung kebijakan rendah karbon dan dilakukan secara transparan, maka pengaruh tersebut dapat memperkuat transisi. Sebaliknya, apabila CPA digunakan untuk melemahkan kebijakan iklim atau mempertahankan kepentingan fosil, maka CPA menjadi faktor penghambat tata kelola transisi energi (Lockwood et al., 2020; Hafner et al., 2022; Bare et al., 2026; Holder et al., 2023).

5. Risiko Akuntabilitas Publik dan Regulasi yang Muncul dari CPA (RQ4)

Untuk menjawab RQ4, artikel ini menyintesis risiko akuntabilitas publik dan regulasi yang muncul dari CPA dalam sektor energi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa risiko utama yang paling menonjol adalah regulatory capture, policy capture, conflict of interest, unequal access, disinformation, weak transparency, dan penurunan legitimasi kebijakan (Stigler, 1971; Carpenter & Moss, 2014; Woods et al., 2026; Marsili, 2025). Risiko-risiko tersebut muncul karena sektor energi melibatkan nilai ekonomi besar, informasi teknis kompleks, dan hubungan erat antara perusahaan, regulator, serta pembuat kebijakan.

Tabel 4. Ringkasan Temuan untuk RQ4

No.	Penulis	Temuan Utama untuk RQ4
1	Woods et al. (2026)	Regulatory capture muncul ketika organisasi industri memiliki kapasitas untuk memengaruhi struktur dan perilaku regulasi.
2	Jang dan Kagan (2025)	Tekanan politik dalam konteks minyak dan gas dapat memengaruhi batas partisipasi publik dan ruang protes.
3	Xie et al. (2025)	Dinamika side events dan interest groups dalam konferensi UNFCCC menunjukkan pentingnya inklusivitas dan akses dalam tata kelola iklim global.
4	Marsili (2025)	Disinformasi dan kontrol informasi dalam transisi energi menimbulkan risiko terhadap akuntabilitas dan hak publik atas informasi yang benar.
5	Miller et al. (2025)	Road lobby dapat membentuk wacana kebijakan yang mengaburkan kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan.
6	Rowe dan Mayes (2025)	Fossil fuel gift economies menunjukkan bagaimana pengaruh industri dapat bekerja melalui pendidikan dan legitimasi sosial.
7	Auvet dan Arnould de Sartre (2026)	Pelabelan lithium sebagai critical mineral dapat membentuk penerimaan kebijakan terhadap ekstraksi, tetapi juga memunculkan konflik legitimasi dan keadilan.

8	Low dan Honegger (2022)	Proyeksi teknologi iklim seperti carbon removal dan sunlight reflection membutuhkan kehati-hatian tata kelola karena dapat membentuk janji sistemik yang menunda mitigasi substantif.
---	-------------------------	---

Berdasarkan Tabel 4, risiko CPA dalam tata kelola transisi energi tidak hanya muncul pada tahap formulasi regulasi, tetapi juga pada tahap agenda setting, implementasi, pengawasan, dan komunikasi publik. Pada tahap agenda setting, korporasi dapat memengaruhi isu mana yang dianggap penting atau tidak penting dalam kebijakan energi. Pada tahap formulasi, korporasi dapat memengaruhi desain regulasi, standar emisi, insentif, atau mekanisme pasar. Pada tahap implementasi, korporasi dapat memengaruhi pengawasan, pemberian izin, atau penerapan sanksi. Pada tahap komunikasi publik, korporasi atau organisasi terkait industri dapat membentuk framing dan narasi yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan transisi energi (Jang & Kagan, 2025; Marsili, 2025; Miller et al., 2025).

Sintesis RQ4 menunjukkan bahwa public accountability menjadi kondisi penting untuk mencegah CPA berubah menjadi dominasi industri. Akuntabilitas publik diperlukan melalui transparansi lobbying, keterbukaan dokumen konsultasi, pengawasan konflik kepentingan, partisipasi masyarakat sipil, pengaturan revolving door, keterbukaan informasi, dan evaluasi independen terhadap kebijakan energi (Carpenter & Moss, 2014; Xie et al., 2025; Woods et al., 2026). Tanpa mekanisme tersebut, pengaruh politik korporasi dapat mengurangi independensi regulator, melemahkan orientasi kepentingan publik, dan menurunkan legitimasi kebijakan transisi energi.

Dengan demikian, risiko utama CPA dalam sektor energi bukan hanya bahwa perusahaan memperoleh keuntungan kebijakan, tetapi bahwa kebijakan publik dapat kehilangan orientasi publiknya. Ketika akses korporasi terhadap pembuat kebijakan lebih kuat dibandingkan akses masyarakat sipil, komunitas terdampak, atau kelompok kepentingan publik, tata kelola transisi energi berisiko menjadi tidak seimbang (Xie et al., 2025; Jang & Kagan, 2025). Oleh karena itu, CPA perlu dianalisis sebagai persoalan akuntabilitas demokratis, bukan hanya sebagai strategi korporasi.

6. Sintesis Lintas-RQ

Sintesis lintas-RQ menunjukkan bahwa CPA dalam tata kelola transisi energi memiliki struktur konseptual yang berlapis. RQ1 menunjukkan bahwa CPA dikonseptualisasikan melalui berbagai istilah, seperti corporate lobbying, climate lobbying, industry influence, policy advocacy, political strategy, disinformation, dan regulatory capture (Lockwood et al., 2020; Sick, 2023; Errichiello et al., 2026; Woods et al., 2026). RQ2 menunjukkan bahwa CPA bekerja melalui berbagai mekanisme, baik formal maupun informal (Holder et al., 2023; Reuter & Überbacher, 2025; Benz et al., 2021). RQ3 menunjukkan bahwa CPA dapat mempercepat atau menghambat transisi energi (Hafner et al., 2022; Bare et al., 2026; Lockwood et al., 2020). RQ4 menunjukkan bahwa CPA menimbulkan risiko tata kelola, terutama ketika akuntabilitas publik lemah (Carpenter & Moss, 2014; Marsili, 2025; Woods et al., 2026).

Tabel 5. Sintesis Lintas-RQ tentang CPA dalam Tata Kelola Transisi Energi

RQ	Temuan Dominan	Critical Insight	Implikasi untuk Pembahasan
RQ1: Konseptualisasi CPA	CPA dikonseptualisasikan sebagai lobbying, industry influence, policy advocacy, political strategy, disinformation, dan regulatory capture.	CPA dalam sektor energi tidak selalu muncul dengan istilah tunggal, tetapi tersebar dalam berbagai konsep politik dan governance.	Pembahasan perlu memosisikan CPA sebagai konsep payung untuk menjelaskan pengaruh politik korporasi dalam transisi energi.
RQ2: Bentuk pengaruh korporasi	Bentuk CPA meliputi direct lobbying, industry association, policy framing, digital communication, disinformation, dan shareholder engagement.	Pengaruh korporasi tidak hanya bekerja melalui akses formal, tetapi juga melalui narasi publik, media digital, dan jaringan kebijakan.	Pembahasan perlu memperluas CPA dari lobbying formal menuju mekanisme pengaruh yang lebih luas.
RQ3: Percepatan atau hambatan	CPA dapat mempercepat transisi jika mendukung regulasi energi bersih, tetapi dapat menghambat transisi jika mempertahankan kepentingan fosil.	Dampak CPA bersifat kontingen dan bergantung pada aktor, kepentingan, mekanisme, serta kualitas governance.	Pembahasan perlu menekankan peran ganda CPA sebagai transition enabler sekaligus transition blocker.
RQ4: Risiko akuntabilitas dan regulasi	Risiko utama CPA adalah regulatory capture, policy capture, conflict of interest, weak transparency, disinformation, dan legitimacy loss.	CPA menjadi problem tata kelola ketika akses korporasi tidak diimbangi transparansi dan partisipasi publik.	Pembahasan perlu memosisikan public accountability sebagai syarat utama untuk menjaga integritas tata kelola transisi energi.

Tabel 5 menunjukkan bahwa CPA dalam tata kelola transisi energi tidak dapat dipahami hanya sebagai strategi non-pasar perusahaan. CPA harus dipahami sebagai mekanisme yang menghubungkan kepentingan korporasi, proses kebijakan, kualitas regulasi, dan akuntabilitas publik (Hillman et al., 2004; Mellahi et al., 2016; Woods et al., 2026). Sintesis lintas-RQ juga menunjukkan bahwa energi merupakan sektor yang sangat rentan terhadap pengaruh politik korporasi karena tingginya nilai ekonomi, kompleksitas teknis, kepentingan strategis negara, dan urgensi perubahan menuju sistem energi rendah karbon (Hafner et al., 2022; Boasson et al., 2023; Xie et al., 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung perlunya model konseptual yang mengintegrasikan Corporate Political Activity, policy influence mechanisms, energy transition governance, regulatory capture, dan public accountability. Model tersebut menjadi dasar

pembahasan pada bagian berikutnya, yaitu bagaimana CPA dapat diposisikan sebagai isu public governance dalam tata kelola transisi energi.

b. Pembahasan

1. Corporate Political Activity sebagai Isu Public Governance

Hasil sintesis menunjukkan bahwa Corporate Political Activity (CPA) dalam tata kelola transisi energi tidak dapat dipahami hanya sebagai strategi non-pasar perusahaan. Dalam literatur manajemen strategis, CPA umumnya dijelaskan sebagai instrumen perusahaan untuk memperoleh akses terhadap pembuat kebijakan, mengurangi ketidakpastian regulasi, memperkuat legitimasi, dan meningkatkan posisi kompetitif (Hillman et al., 2004; Lawton et al., 2013; Mellahi et al., 2016). Perspektif ini penting karena menjelaskan mengapa perusahaan melakukan aktivitas politik dalam lingkungan regulatif yang tidak pasti. Namun, dalam konteks transisi energi, CPA memiliki konsekuensi yang lebih luas karena pengaruh politik korporasi dapat membentuk arah kebijakan publik, desain regulasi, distribusi biaya transisi, dan legitimasi kebijakan iklim.

Transisi energi merupakan arena kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh keputusan negara, seperti subsidi energi, tarif listrik, standar emisi, pajak karbon, izin proyek energi, regulasi minyak dan gas, serta insentif energi terbarukan. Keputusan-keputusan tersebut dapat menciptakan peluang bagi perusahaan energi bersih, tetapi juga dapat mengancam model bisnis perusahaan energi fosil dan industri padat karbon. Karena itu, korporasi memiliki insentif kuat untuk memengaruhi proses kebijakan melalui lobbying, advokasi kebijakan, asosiasi industri, framing, dan strategi komunikasi publik (Lockwood et al., 2020; Sick, 2023; Errichiello et al., 2026). Dalam konteks ini, CPA tidak lagi hanya berfungsi sebagai strategi korporasi, tetapi menjadi bagian dari proses tata kelola publik.

Temuan artikel ini memperluas pemahaman terhadap CPA dengan menempatkannya sebagai isu public governance. Artinya, pertanyaan utama bukan hanya apakah CPA memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi bagaimana CPA memengaruhi kualitas kebijakan, independensi regulator, transparansi proses regulasi, dan akuntabilitas demokratis. Pergeseran ini penting karena transisi energi menyangkut kepentingan publik yang luas, termasuk keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, keamanan energi, dan perlindungan kelompok terdampak. Dengan demikian, CPA dalam sektor energi harus dinilai berdasarkan konsekuensinya terhadap tata kelola publik, bukan hanya berdasarkan manfaat strategisnya bagi perusahaan.

2. Peran Ganda CPA dalam Tata Kelola Transisi Energi

Salah satu temuan utama artikel ini adalah bahwa CPA memiliki peran ganda dalam tata kelola transisi energi. Di satu sisi, CPA dapat berfungsi sebagai mekanisme percepatan transisi apabila digunakan untuk mendukung kebijakan energi bersih, memperkuat kepastian investasi rendah karbon, mendorong dekarbonisasi industri, dan memperluas dukungan terhadap regulasi iklim yang lebih ambisius. Studi tentang dekarbonisasi industri menunjukkan bahwa perspektif perusahaan dapat membantu perumusan kebijakan yang lebih realistis dan implementatif, terutama ketika kebijakan transisi membutuhkan investasi, teknologi, dan

kapasitas operasional dari sektor swasta (Hafner et al., 2022). Respons korporasi terhadap Paris Agreement juga menunjukkan bahwa sebagian perusahaan dapat menyesuaikan strategi bisnisnya dengan tekanan dekarbonisasi dan agenda iklim global (Bare et al., 2026).

Namun, di sisi lain, CPA dapat menjadi mekanisme penghambat transisi apabila digunakan untuk mempertahankan kepentingan energi fosil dan industri padat karbon. Lockwood et al. (2020) menunjukkan bahwa incumbent lobbying dapat menjadi hambatan terhadap regulasi energi yang lebih forward-looking. Holder et al. (2023) menunjukkan bahwa organisasi penghambat iklim menggunakan iklan digital untuk menyebarkan discourse of delay. Marsili (2025) juga menunjukkan bahwa disinformasi dan kontrol informasi dapat menjadi bagian dari corporate influence dalam transisi energi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan transisi tidak selalu berbentuk penolakan eksplisit, tetapi juga dapat muncul melalui strategi penundaan, pelemahan ambisi regulasi, dan pembentukan narasi publik yang meragukan urgensi kebijakan iklim.

Peran ganda ini menunjukkan bahwa CPA tidak dapat dikategorikan secara sederhana sebagai positif atau negatif. Dampaknya bersifat kontingen dan bergantung pada aktor yang melakukan, kepentingan yang diperjuangkan, mekanisme pengaruh yang digunakan, serta kualitas tata kelola publik. CPA yang dilakukan secara transparan, berbasis bukti, dan sejalan dengan target dekarbonisasi dapat mendukung transisi energi. Sebaliknya, CPA yang dilakukan secara tertutup, manipulatif, atau diarahkan untuk mempertahankan ketergantungan terhadap energi karbon dapat menghambat perubahan sistem energi. Dengan demikian, penilaian terhadap CPA harus diarahkan pada konsekuensi publiknya terhadap arah transisi energi.

3. Dari Corporate Influence menuju Regulatory Capture

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa risiko terbesar dari CPA dalam sektor energi adalah regulatory capture. Regulatory capture terjadi ketika regulator atau pembuat kebijakan lebih responsif terhadap kepentingan industri yang diatur daripada kepentingan publik (Stigler, 1971; Dal Bó, 2006). Dalam konteks transisi energi, risiko ini menjadi lebih tinggi karena sektor energi melibatkan nilai ekonomi yang besar, informasi teknis yang kompleks, dan hubungan kelembagaan yang erat antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri. Carpenter dan Moss (2014) menekankan bahwa capture tidak selalu muncul dalam bentuk penyimpangan langsung, tetapi dapat terjadi melalui proses pengaruh yang membuat kebijakan secara bertahap lebih condong kepada kepentingan industri.

Regulatory capture dalam tata kelola transisi energi dapat terjadi pada beberapa tahap. Pada tahap agenda setting, aktor industri dapat memengaruhi isu mana yang dianggap penting atau tidak penting dalam kebijakan energi. Pada tahap formulasi kebijakan, industri dapat memengaruhi desain regulasi, standar emisi, insentif, atau mekanisme pasar. Pada tahap implementasi, industri dapat memengaruhi pengawasan, pemberian izin, atau penerapan sanksi. Pada tahap komunikasi publik, korporasi atau organisasi terkait industri dapat membentuk framing dan narasi yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan transisi energi (Marsili, 2025; Miller et al., 2025). Dengan demikian, capture tidak hanya terjadi dalam ruang regulasi formal, tetapi juga dalam ruang politik, pengetahuan, dan komunikasi publik.

Temuan ini memperluas pemahaman mengenai regulatory capture dalam sektor energi. Capture tidak hanya dapat dipahami sebagai kegagalan regulator dalam mengawasi industri, tetapi juga sebagai proses politik yang berlapis. Woods et al. (2026) menunjukkan bahwa organisasi industri dapat memiliki kapasitas untuk memengaruhi struktur dan perilaku regulasi. Jang dan Kagan (2025) memperlihatkan bahwa tekanan politik dalam konteks minyak dan gas dapat memengaruhi ruang partisipasi publik. Xie et al. (2025) menunjukkan bahwa dinamika kelompok kepentingan dalam tata kelola iklim global memunculkan persoalan akses dan inklusivitas. Dengan demikian, risiko capture harus dilihat bersama dengan persoalan partisipasi, transparansi, dan distribusi akses dalam proses kebijakan.

4. Public Accountability sebagai Mekanisme Pengaman Tata Kelola

Public accountability menjadi mekanisme penting untuk mengendalikan risiko CPA dalam tata kelola transisi energi. Keterlibatan korporasi dalam kebijakan energi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena perusahaan memiliki informasi teknis, kapasitas investasi, teknologi, dan pengalaman operasional yang dibutuhkan dalam proses transisi. Namun, keterlibatan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas agar tidak berubah menjadi dominasi industri. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, pengaruh korporasi dapat membuat kebijakan energi kehilangan orientasi publiknya.

Akuntabilitas publik dapat diperkuat melalui beberapa mekanisme. Pertama, transparansi lobbying diperlukan agar publik dapat mengetahui aktor mana yang memengaruhi kebijakan, isu apa yang diperjuangkan, dan sejauh mana akses korporasi terhadap pembuat keputusan. Kedua, keterbukaan dokumen konsultasi diperlukan agar argumen teknis dan posisi kebijakan industri dapat diuji oleh publik. Ketiga, aturan konflik kepentingan dan pembatasan revolving door diperlukan untuk menjaga independensi regulator. Keempat, partisipasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas terdampak, dan kelompok lingkungan diperlukan untuk menyeimbangkan akses korporasi dalam proses kebijakan (Carpenter & Moss, 2014; Xie et al., 2025; Boasson et al., 2023).

Selain itu, akuntabilitas publik perlu diperluas ke ruang komunikasi digital. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengaruh politik korporasi tidak hanya berlangsung melalui lobbying formal, tetapi juga melalui iklan digital, disinformasi, framing publik, dan pembentukan narasi penundaan (Holder et al., 2023; Marsili, 2025; Miller et al., 2025). Karena itu, pengawasan terhadap CPA tidak cukup dilakukan melalui regulasi lobbying konvensional. Pemerintah, regulator, masyarakat sipil, dan akademisi juga perlu mengawasi komunikasi publik korporasi, konsistensi klaim ESG, posisi perusahaan terhadap kebijakan iklim, dan kemungkinan terjadinya greenwashing. Dalam konteks ini, public accountability menjadi syarat untuk memastikan bahwa keterlibatan korporasi dalam kebijakan energi tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

5. Model Public Governance Terintegrasi CPA dalam Tata Kelola Transisi Energi

Berdasarkan hasil sintesis, artikel ini mengembangkan model public governance terintegrasi yang menempatkan CPA sebagai mekanisme pengaruh politik korporasi dalam tata kelola transisi energi. Model ini terdiri atas empat komponen utama. Komponen pertama adalah Corporate Political Activity, yaitu aktivitas politik korporasi dan industri yang mencakup lobbying, policy advocacy, industry association, political strategy, public

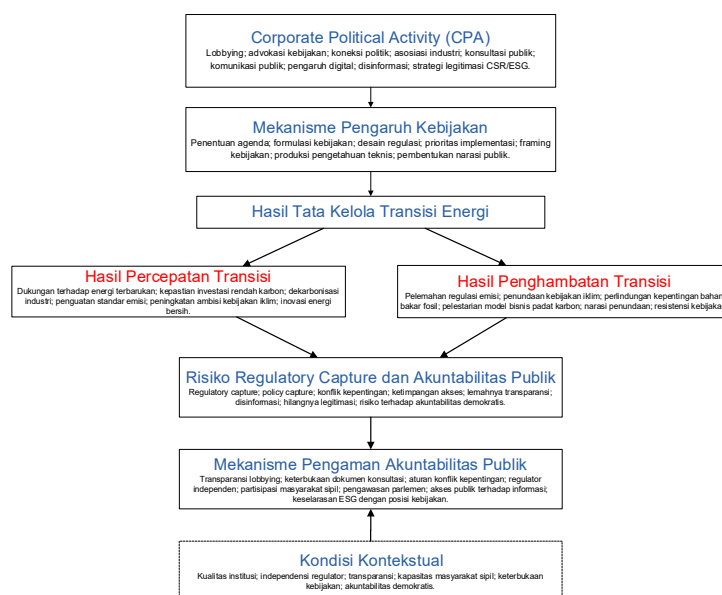
communication, disinformation, shareholder engagement, dan strategi legitimasi. Komponen kedua adalah policy influence mechanisms, yaitu saluran melalui mana CPA memengaruhi agenda setting, formulasi kebijakan, desain regulasi, implementasi, evaluasi, dan komunikasi publik.

Komponen ketiga adalah energy transition governance outcomes. Pada bagian ini, CPA dapat menghasilkan dua arah dampak, yaitu acceleration dan obstruction. Acceleration terjadi ketika CPA mendukung penguatan kebijakan energi bersih, investasi rendah karbon, dekarbonisasi industri, dan regulasi iklim yang lebih ambisius (Hafner et al., 2022; Bare et al., 2026; Heck et al., 2024). Obstruction terjadi ketika CPA digunakan untuk melemahkan regulasi, menunda reformasi, mempertahankan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, atau mengurangi ambisi kebijakan iklim (Lockwood et al., 2020; Holder et al., 2023; Marsili, 2025). Komponen keempat adalah regulatory capture and public accountability risks, yaitu risiko dan mekanisme pengendalian yang menentukan apakah CPA tetap berada dalam koridor kepentingan publik atau berubah menjadi dominasi industri.

Secara konseptual, model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Corporate Political Activity → Policy Influence Mechanisms → Energy Transition Governance Outcomes → Regulatory Capture/Public Accountability Risks

Model ini menunjukkan bahwa hubungan antara CPA dan transisi energi tidak bersifat linear dan deterministik. Dampak CPA dipengaruhi oleh kualitas institusi, transparansi kebijakan, independensi regulator, kekuatan masyarakat sipil, pengawasan parlemen, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas publik. Dalam lingkungan tata kelola yang kuat, CPA dapat dikendalikan agar berkontribusi pada kebijakan energi yang lebih transparan dan berorientasi publik. Dalam lingkungan tata kelola yang lemah, CPA lebih berisiko menjadi alat dominasi industri dan penghambat transisi energi.



Gambar 2. Model Tata Kelola Publik Terintegrasi Aktivitas Politik Korporasi dalam Tata Kelola Transisi Energi

Gambar 2 menyajikan model konseptual yang dikembangkan dari tinjauan tersebut. Model ini menempatkan CPA sebagai mekanisme pengaruh korporasi dan industri yang membentuk tata kelola transisi energi melalui saluran kebijakan formal dan informal. Model ini juga menunjukkan bahwa CPA dapat menghasilkan percepatan atau penghambatan, tergantung pada orientasi aktor, konteks kebijakan, dan lingkungan akuntabilitas. Akuntabilitas publik berfungsi sebagai pengaman tata kelola yang mengurangi risiko penguasaan regulasi dan memperkuat legitimasi kebijakan transisi energi.

E. Kesimpulan

Systematic Literature Review ini mengkaji Corporate Political Activity dalam tata kelola transisi energi dengan menyintesis 30 artikel jurnal open access terindeks Scopus yang diterbitkan pada periode 2020–2026. Hasil review menunjukkan bahwa CPA dalam literatur transisi energi tidak selalu dinyatakan melalui satu konsep tunggal. CPA muncul melalui berbagai istilah yang saling berkaitan, seperti corporate lobbying, climate lobbying, fossil fuel lobbying, industry influence, policy advocacy, political strategy, policy entrepreneurship, disinformation, shareholder engagement, dan regulatory capture. Keragaman istilah tersebut menunjukkan bahwa CPA dalam tata kelola transisi energi merupakan fenomena lintas disiplin yang menghubungkan manajemen strategis, kebijakan energi, politik iklim, administrasi publik, dan tata kelola regulasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa CPA bekerja melalui berbagai mekanisme pengaruh kebijakan. Mekanisme tersebut mencakup direct lobbying, asosiasi industri, policy framing, partisipasi dalam konsultasi kebijakan, produksi pengetahuan teknis, komunikasi digital, disinformasi, pembentukan narasi publik, dan tekanan investor. Melalui mekanisme tersebut, korporasi dan kelompok industri dapat memengaruhi agenda setting, formulasi kebijakan, desain regulasi, prioritas implementasi, serta persepsi publik terhadap transisi energi. Oleh karena itu, CPA tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas lobbying formal, tetapi sebagai rangkaian strategi korporasi dan industri yang lebih luas dalam memengaruhi kebijakan serta tata kelola publik.

Review ini juga menunjukkan bahwa CPA memiliki peran ganda dalam tata kelola transisi energi. Di satu sisi, CPA dapat menjadi mekanisme percepatan transisi apabila digunakan untuk mendukung insentif energi terbarukan, kepastian investasi rendah karbon, dekarbonisasi industri, standar emisi yang lebih kuat, dan regulasi iklim yang lebih ambisius. Di sisi lain, CPA dapat menjadi mekanisme penghambat apabila digunakan untuk melindungi kepentingan bahan bakar fosil, melemahkan ambisi regulasi, menunda kebijakan iklim, mempertahankan model bisnis padat karbon, menyebarkan disinformasi, atau membentuk narasi penundaan. Dengan demikian, dampak CPA bersifat kontingen dan bergantung pada orientasi aktor, konteks kebijakan, kualitas kelembagaan, serta kekuatan mekanisme akuntabilitas publik.

Kontribusi utama artikel ini adalah pengembangan model public governance terintegrasi mengenai CPA dalam tata kelola transisi energi. Model tersebut menghubungkan Corporate Political Activity, policy influence mechanisms, energy transition governance outcomes, regulatory capture, dan public accountability. Model ini memperluas literatur CPA dengan menggeser fokus analisis dari firm-level outcomes menuju public governance outcomes.

Artikel ini juga berkontribusi pada kajian tata kelola transisi energi dengan menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya dibentuk oleh teknologi, pembiayaan, dan desain kebijakan, tetapi juga oleh pengaruh politik korporasi serta kualitas akuntabilitas yang mengatur pengaruh tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, review hanya menggunakan artikel jurnal open access terindeks Scopus, sehingga studi relevan dari database lain atau jurnal berbayar mungkin belum tercakup. Kedua, review difokuskan pada artikel periode 2020–2026, sehingga memperkuat relevansi literatur terbaru, tetapi dapat mengecualikan kajian klasik tentang lobbying, regulatory capture, dan non-market strategy. Ketiga, penelitian ini menggunakan sintesis tematik, bukan meta-analisis kuantitatif, sehingga tidak mengukur pengaruh statistik CPA terhadap hasil kebijakan. Penelitian berikutnya dapat menguji model yang diusulkan melalui studi kasus komparatif, analisis jaringan kebijakan, data kuantitatif lobbying, dan analisis lintas negara. Riset lanjutan juga perlu memperhatikan digital CPA, fossil fuel lobbying, greenwashing, keselarasan ESG dengan posisi kebijakan, serta hubungan antara komitmen iklim korporasi dan perilaku politik aktualnya.

F. Daftar Pustaka

- Auvel, B., & Arnould de Sartre, X. (2026). Does labelling lithium as “critical” make mining acceptable? From European policy and discourse apparatus to contested lithium extraction projects in Europe. *The Extractive Industries and Society*, 27, Article 101922. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2026.101922>
- Bare, F., Colgan, J. D., & Gard-Murray, A. S. (2026). Driving decarbonization? Corporate responses to the Paris climate agreement in the global automotive sector. *Energy Research & Social Science*, 132, Article 104549. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2026.104549>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Baron, D. P. (1995). Integrated strategy: Market and nonmarket components. *California Management Review*, 37(2), 47–65. <https://doi.org/10.2307/41165788>
- Battersby, F., Heap, R. J., Gray, A. C., Workman, M., & Strivens, F. (2022). The role of corporates in governing carbon dioxide removal: Outlining a research agenda. *Frontiers in Climate*, 4, Article 686762. <https://doi.org/10.3389/fclim.2022.686762>
- Benz, L., Paulus, S., Scherer, J., Syryca, J., & Trück, S. (2021). Investors’ carbon risk exposure and their potential for shareholder engagement. *Business Strategy and the Environment*, 30(1), 282–301. <https://doi.org/10.1002/bse.2621>
- Boasson, E. L., Burns, C., & Pulver, S. (2023). The politics of domestic climate governance: Making sense of complex participation patterns. *Journal of European Public Policy*, 30(3), 513–536. <https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2096102>

- Carpenter, D., & Moss, D. A. (Eds.). (2014). *Preventing regulatory capture: Special interest influence and how to limit it*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139565875>
- Dal Bó, E. (2006). Regulatory capture: A review. *Oxford Review of Economic Policy*, 22(2), 203–225. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grj013>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Drahos, N. (2025). Breaking ranks: Business fragmentation over climate policy reforms. *Business and Politics*, 27(3), 442–464. <https://doi.org/10.1017/bap.2025.2>
- Errichiello, G., Popoyan, L., Bonasia, M., & Falcone, P. M. (2026). Composition and determinants of corporate climate lobbying: Evidence from Italy. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 33(1), 189–216. <https://doi.org/10.1002/csr.70148>
- Hafner, S., Speich, M., Bischofberger, P., & Ulli-Beer, S. (2022). Governing industry decarbonisation: Policy implications from a firm perspective. *Journal of Cleaner Production*, 375, Article 133884. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133884>
- Heck, J., Jahnke, L., & Leker, J. (2024). Early evidence of a transition towards sustainability-oriented decision-making in the chemical industry in Germany, Austria, and Switzerland: A choice-based conjoint analysis. *Energy Policy*, 187, Article 114028. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114028>
- Hillman, A. J., Keim, G. D., & Schuler, D. (2004). Corporate political activity: A review and research agenda. *Journal of Management*, 30(6), 837–857. <https://doi.org/10.1016/j.jm.2004.06.003>
- Holder, F., Mirza, S., Namson-Ngo-Lee, Carbone, J., & McKie, R. E. (2023). Climate obstruction and Facebook advertising: How a sample of climate obstruction organizations use social media to disseminate discourses of delay. *Climatic Change*, 176(2), Article 16. <https://doi.org/10.1007/s10584-023-03494-4>
- International Energy Agency. (2025). *Greenhouse Gas Emissions from Energy Data Explorer*. <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/greenhouse-gas-emissions-from-energy-data-explorer>
- Jang, S., & Kagan, J. A. (2025). Banning protests at oil and gas sites: The influence of policy entrepreneurs and political pressure. *Environmental Policy and Governance*, 35(1), 172–184. <https://doi.org/10.1002/eet.2130>
- Jiao, W., Shi, L., Li, C., & Cheng, F. (2025). Anchoring industrial symbiosis in the context of policy change. *Journal of Industrial Ecology*, 29(6), 2417–2428. <https://doi.org/10.1111/jiec.70124>

- Lamb, W. F., Low, S., Gordon, L.-M., & Mattila, M. (2025). How are oil and gas firms integrating carbon dioxide removal into their climate strategies? *Energy Research & Social Science*, 127, Article 104237. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104237>
- Lawton, T., McGuire, S., & Rajwani, T. (2013). Corporate political activity: A literature review and research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 15(1), 86–105. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2012.00337.x>
- Leite, A. L. D. S., & Nunes, N. (2020). Institutional environment and the strategies of the firms of the Brazilian electricity industry. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(6), 53–58. <https://doi.org/10.32479/ijeep.9907>
- Lobonț, O.-R., Varadi, A.-E., Vătavu, S., & Doran, N.-M. (2025). Bridges or barriers? Unpacking the institutional drivers of business climate adaptation in the EU. *Sustainability*, 17(11), Article 4865. <https://doi.org/10.3390/su17114865>
- Lockwood, M., Mitchell, C., & Hoggett, R. (2020). Incumbent lobbying as a barrier to forward-looking regulation: The case of demand-side response in the GB capacity market for electricity. *Energy Policy*, 140, Article 111426. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111426>
- Low, S., & Honegger, M. (2022). A precautionary assessment of systemic projections and promises from sunlight reflection and carbon removal modeling. *Risk Analysis*, 42(9), 1965–1979. <https://doi.org/10.1111/risa.13826>
- Marsili, M. (2025). Cognitive warfare, disinformation, and corporate influence in Europe's energy transition: Information control, regulation, and human rights implications. *Applied Cybersecurity and Internet Governance*, 4(1). <https://doi.org/10.60097/ACIG/214045>
- Mellahi, K., Frynas, J. G., Sun, P., & Siegel, D. (2016). A review of the nonmarket strategy literature: Toward a multi-theoretical integration. *Journal of Management*, 42(1), 143–173. <https://doi.org/10.1177/0149206315617241>
- Mialon, M., Larkin, J., Patton, C., Tatlow-Golden, M., Reilly, K., Leonard, P., Walsh, M., & Campbell, N. (2024). The commercial determinants of health in Ireland: Fueling an industrial epidemic at home and abroad. *BJGP Open*, 8(2), Article BJGPO.2024.0029. <https://doi.org/10.3399/BJGPO.2024.0029>
- Miller, A., Osborne, E., Edwards, R., Macmillan, A., & Shaw, C. (2025). The road lobby and unhealthy transport policy discourse in Aotearoa New Zealand: A framing analysis. *Journal of Transport & Health*, 41, Article 101999. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2025.101999>
- Morris, V., & Jacquet, J. (2024). The animal agriculture industry, US universities, and the obstruction of climate understanding and policy. *Climatic Change*, 177(3), Article 41. <https://doi.org/10.1007/s10584-024-03690-w>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J.,

- Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, Article n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pakpahan, S. M., & Hutahayan, B. (2026). The role of Corporate Political Activity in shaping organizational outcomes: A systematic literature review [Version 2; peer review: 2 approved]. *F1000Research*, 14, Article 1046. <https://doi.org/10.12688/f1000research.169272.2>
- Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., & Koffel, J. B. (2021). PRISMA-S: An extension to the PRISMA statement for reporting literature searches in systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10, Article 39. <https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z>
- Reuter, E., & Überbacher, F. (2025). Coping with procedural uncertainty: Firms' procedural framings and political strategies in the context of Switzerland's mission-driven energy policy. *Business Strategy and the Environment*, 34(2), 2511–2528. <https://doi.org/10.1002/bse.4116>
- Rowe, E., & Mayes, E. (2025). Fossil fuel gift economies as petro-pedagogies in public schools. *The Australian Educational Researcher*, 52(6), 4535–4554. <https://doi.org/10.1007/s13384-025-00909-2>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sick, H. (2023). From rhetoric to regulation: Inferring lobbying influence on EU efforts to regulate CO₂ emissions of cars using network analysis. *Interest Groups & Advocacy*, 12(4), 388–412. <https://doi.org/10.1057/s41309-023-00195-2>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21. <https://doi.org/10.2307/3003160>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, Article 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015). *Paris Agreement*. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (2023). *Outcome of the first global stocktake: Draft decision -/CMA.5*. <https://unfccc.int/documents/636608>

- von Malmborg, F. (2025). At the controls: Politics and policy entrepreneurs in EU policy to decarbonize maritime transport. *Review of Policy Research*, 42(5), 1243–1276. <https://doi.org/10.1111/ropr.12609>
- von Malmborg, F. (2026). Comparing strategies and success of policy entrepreneurs in EU energy and climate policy processes. *Energy, Sustainability and Society*, 16, Article 2. <https://doi.org/10.1186/s13705-026-00563-1>
- Wang, J., Liu, Y., Fan, Y., & Guo, J. (2020). The impact of industry on European Union emissions trading market: From network perspective. *Energies*, 13(21), Article 5642. <https://doi.org/10.3390/en13215642>
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii–xxiii.
- Woods, N. D., Aba, K., & Baily, S. (2026). The industrial organization of regulatory capture. *Social Science Quarterly*, 107(4), Article e70173. <https://doi.org/10.1111/ssqu.70173>
- Xie, J. J., Escher, N. A., Dunn, M. E., Yu, Y., Staffell, I., & Rogelj, J. (2025). Tracing inclusivity at UNFCCC conferences through side events and interest group dynamics. *Nature Climate Change*, 15(3), 270–278. <https://doi.org/10.1038/s41558-025-02254-9>
- Zhang, X., Qu, T., & Li, T. (2023). Clean coal governance strategies of multi-level government. *Energy Strategy Reviews*, 50, Article 101227. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101227>
- Zhakiyev, N., Khamzina, A., Bakdolotov, A., & De Miglio, R. (2026). Qualitative analysis of stakeholder risk perceptions in Kazakhstan's energy transformation. *Frontiers in Sustainability*, 6, Article 1706204. <https://doi.org/10.3389/frsus.2025.1706204>